



Pendidikan Politik Pada Pilkades Desa Masangan Wetan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Suyono

Program Studi PKn, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia

suyono@unipasby.ac.id

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Pendidikan politik, Politik uang, Pemilihan kepala desa</p> <p>Diterima: 21-01-2021</p> <p>Disetujui: 05-02-2021</p> <p>Dipublikasikan: 26-02-2021</p>	<p>Untuk mendeskripsikan kegiatan pemberian dana pada Pilkades di Desa Masangan Wetan Sidoarjo dan memberikan penjelasan Resolusi untuk mengatasi fenomena maraknya politik uang pada Pilkades desa Masangan Wetan Sidoarjo. Tujuan Penelitian adalah untuk mendeskripsikan kegiatan pemberian dana Pilkades di Desa Masangan Wetan Sidoarjo, dan serta untuk menemukan resolusi untuk mengatasi fenomena maraknya politik uang yang pada Pilkades di Desa Masangan Wetan Sidoarjo. Metode bersifat deskriptif kualitatif, dalam hal ini informan penelitian adalah beberapa pemilih yang ada di Desa Masangan Wetan Sidoarjo dengan teknik pengumpulan data dipergunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian dengan pendekatan yang didapat dalam menganalisis Pendidikan politik dalam Pilkades Desa Masangan Wetan Sidoarjo Tahun 2020 di Desa Masangan Wetan, dengan gerakan dusun anti money politik terbukti masyarakat desa Masangan Wetan secara riil mampu menurunkan angka politik uang secara drastis pada Pemilihan Kepala Desa. Simpulan dan implikasi penelitian ini adalah Pendidikan politik mampu meningkatkan kesadaran perilaku politik masyarakat melalui Kader-kadernya Pemerintah, Sekolah dan Partai Politik meskipun dengan sumber daya masyarakat (SDM) yang masih rendah</p>

Abstact

To describe the activity of giving funds to Pilkades in Masangan Wetan Sidoarjo Village and provide an explanation of the Resolution to overcome the phenomenon of the rampant money politics in the Pilkades of Masangan Wetan Village, Sidoarjo. The research objective was to describe the activities of giving Pilkades funds in Masangan Wetan Sidoarjo Village, and to find a resolution to overcome the phenomenon of the rampant money politics that occurred in Pilkades in Masangan Wetan Sidoarjo Village. The method is descriptive qualitative, in this case the research informants are several voters in Masangan Wetan Sidoarjo village with data collection techniques used in-depth interviews, observation and document study. The results of the research with the approach obtained in analyzing political education in the Pilkades of Masangan Wetan Sidoarjo Village in 2020 in Masangan Wetan Village, with the anti-money political hamlet movement, proved that the Masangan Wetan village community was able to reduce the number of money politics drastically in the Village Head Election. The conclusions and implications of this research are that political education is able to increase awareness of public political behavior through its cadres of the government, schools and political parties even though the community resources (HR) are still low

PENDAHULUAN

.Politik uang pada setiap pesta demokrasi, untuk memilih anggota dewan Perwakilan Daerah dan pemilihan Kepala Desa, di Indonesia fakta sosial masih semarak meskipun berbagai regulasi dan badan-badan yang berwenang untuk menindak pelanggaran-pelanggaran dalam berpolitik tersebut sudah dibentuk dan diperkuat oleh Pemerintah. Harus diterima bahwa money politic penyimpangan besar pada waktu pendaftaran elit pimpinan untuk dipilih, pada waktu berlangsungnya Pemilihan Kepala desa. Penyimpangan berlangsung dari dulu sampai sekarang disebabkan karena penyimpangan pemilihan pemimpin terjadi karena sudah salah kaprah masyarakat sudah mengetahui dianggap suatu hal yang terbiasa dan merupakan suatu tawaran. (Sanusi & Darmawan, 2016)

Dalam membahas kampanye dilakukan oleh para calon Kepala desa Bersama Tim Suksesnya, terutama tentang kesetiaan yang menjadi ciri khusus antara Calon Kepala desa dengan para Kadernya, dalam lingkungan politik yang serba dilingkupi patronase seperti yang terjadi di Indonesia. (Sukmajati, 2013) Dimana calon Kepala Desa menawarkan materi kepada pemilih dan pekerja kampanye, dimana para pemilih dapat mencapai keuntungan ekonomi dan sosial dengan merekatkan diri ke pemenang, orang-orang yang melakukan kampanye patuh pada godaan, yang paling diutamakan mencuri sebagian sumber daya yang dimiliki oleh seorang calon membelot pada calon yang lebih kaya atau lebih kuat untuk mendapatkan imbalan dari praktek sebagai broker namun hanya mengeluarkan sedikit usaha.

Terjadinya money politic terjadi disemua lini tidak hanya pada Pilgub, pemilihan Bupati, Pemilihan Walikota tetapi juga terjadi pada pemilihan Kepala Desa yang sudah lama terjadi dan sudah ada sebelum kemerdekaan. Sejak jaman VOC ditataran bumi Jawa telah diadakan Pilkades, rakyat untuk mempercayakan pada pemimpin di desanya yang dipilih oleh masyarakat pemilihnya. Pada saat itu pemilihan yang memilih dari kalangan yang sangat terbatas seperti kalangan elit desa ataupun anak turun dari Pimpinan Desa tersebut (Alamsyah, 2011)

Pemilihan Kepala desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Sidoarjo, untuk hak pilih dalam Daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 2.779 dari data pemilih DPT desa masangan Wetan yaitu sebanyak 3.305. sedangkan jumlah suara yang sah sebanyak 2.777 dan jumlah suara dinyatakan kosong ada 2 suara, fakta yang terjadi di temui beberapa kader dari calon Kepala desa membagi-bagikan uang pada warganya, kegiatan semacam itu sering ditemui pada desa-desa lain. Kejadian tersebut masih banyak dilakukan karena pada tahun 2020 akan diadakan Pemilihan Kepala desa serentak sekabupaten Sidoarjo, sehingga terjadi persaingan yang sangat kuat, ketat dan menjadi pembicaraan di kabupaten Sidoarjo saat ini.

Persaingan ketat antar Calon Kepala Desa memunculkan sentifitas antar pendukung yang dapat memicu konflik. Yang tidak bisa dihindarkan kompetisi untuk memperoleh dukungan dari warga bagi beberapa calon Kepala desa tidak bisa dihindarkan termasuk pemberian uang pada warga masyarakat dari para Kader yang diberi wewenang oleh Para Calon Kepala Desa. Jor-joran pemberian uang yang dilakukan oleh para Kader dari Calon Kepala desa tidak bisa dihindarkan dalam memenangkan kompetisi dalam pertarungan tersebut.

Praktik politik uang pada pemilihan Kepala Desa, akan mempersempit kesempatan munculnya pemimpin kapabel, pemimpin yang memikirkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat, juga dapat memancing munculnya konflik dan tidak keharmonisan warga desa. Konflik-konflik vertical dan horizontal yang berkepanjangan. Beberapa kerugian sekaligus yang dialami masyarakat Desa ini akibat politik uang (1) kesulitan untuk mendapatkan Pemimpin Desa yang berkualitas (2) memunculkan anarki, konflik vertical dan horizontal. Fenomenanya politik uang ini serta merta tidak dapat menyalahkan kandidat Calon Kepala desa ataupun masyarakat yang mendukung Kandidat selama ini atau Tim sukses beberapa calon Pemimpin Desa, nota bene menjadi pelaku utama politik uang.

Pada kenyataannya tidak menyalahkan para kader dari beberapa calon Pemimpin Desa atau orang-orang mendukung Kepala desa yang menjadi pelaku utama politik uang. Yang perlu didalami dari sudut pandang lain bahwa masih lemahnya kesadaran politik dan daripada pemegang hak politik sendiri yaitu rakyat sebagai individu. Di desa desa yang rakyatnya kesadaran politiknya masih rendah di negara berkembang, banyak menjadi omongan, Maju menjadi kepala desa kok tidak punya uang dan tidak memberikan uang pada saat menjelang pemilihan Kepala desa. pada saat yang sama rakyat akan memberikan dukungan dan mengapresiasi kalau ada Pemimpin Desa akan maju memberikan dana paling kuat.

Kenyataan tersebut benar terjadi dan telah menjadi salah kaprah di masyarakat sendiri. Berbagai upaya dan berbagai kebijakan yang mengatur terhadap hal tersebut tetapi pada kenyataannya mengabaikan dan menutup mata seakan akan tidak terjadi apa-apa dan belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Bahkan yang terjadi seharusnya para oknum-oknum dari Lembaga yang seharusnya memberikan sanksi bagi pelaku politik uang justru melakukan kesempatan dalam kesempitan untuk kepentingan diri sendiri dan menggadaikan tugas untuk berlangsungnya Pemilihan Kepala Desa yang murni dan konsekuen

Sebenarnya Kompetisi calon Pemimpin desa yang bebas dari pemberian uang pada warganya, akan memunculkan Pemimpin yang benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat juga memikirkan keamanan dan kenyamanan rakyatnya. Kepemimpinan yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam era desentralisasi era sekarang. Dalam pengelolaan otonomi secara bermakna dan lebih maksimal dibutuhkan pemimpin di Desa yang memiliki kompetensi dibidang politik, maupun dibidang manajerial, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta komunikasi. Desa butuh kehadiran Pemimpin yang berkualitas, kompetensi, kaya akan empati dan simpati serta memiliki legitimasi dan formalitas, kerja keras dan peka terhadap lingkungan dan punya hati Nurani.

Politik uang sering terjadi, asal memilih pemimpin, banyak orang yang antusias ingin jadi pemimpin, tetapi yang jarang untuk menjadi Pucuk Pimpinan yaitu individu yang semangat orang dihormati dan dipercayai sepenuhnya oleh masyarakat. Yang harus dihindari kemunculan pemimpin yang memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat tanpa ada jiwa kepemimpinan. Situasi politik uang kenyatannya telah mengakar rumput bahkan pada pemilihan kepala desa yang angka politik uang tertinggi ditemui di Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, hal ini diakui oleh Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo sebagai Badan yang ditugasi menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan

system pemilihan serentak yang diharapkan sebagai solusi untuk menekan adanya politik uang dan perjudian, Pemilihan Kepala Desa kenyataannya tidak dapat menunjukkan hasil yang maksimal.

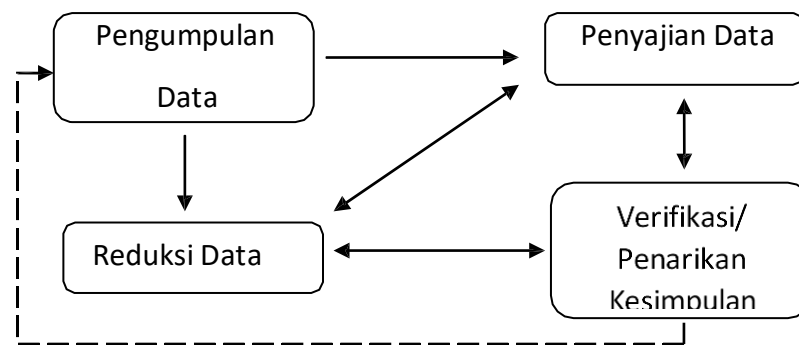
Secara logika dengan banyak mengeluarkan uang dan barang yang cukup besar untuk keperluan kampanye maka pada saat menjabat akan melakukan dengan segala daya untuk mengembalikan modal tersebut, apalagi modal yang dipakai pinjaman dari pihak orang lain. Sudah menjadi kebiasaan bantuan yang diberikan pada Calon kepala Desa pada saat kampanye tidak Cuma-Cuma, pihak tersebut akan meminta balas budi seperti proyek-proyek pembangunan desa. Praktek politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa dapat menciderai nilai-nilai dari demokrasi sendiri. Praktek politik uang dapat dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat itu sendiri. Kebanyakan masyarakat masih menutup mata dan belum menganggap permasalahan politik uang itu sebagai hal yang menyimpang, hal ini dikarenakan kesadaran politik masyarakat sangat rendah

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kegiatan pemberian dana pada Pilkades di Desa Masangan Wetan Sidoarjo dan menemukan penjelasan Resolusi untuk mengatasi fenomena maraknya politik uang pada Pilkades desa Masangan Wetan Sidoarjo. Dalam penelitian ini peneliti tertantang pada sebuah pertanyaan. Bagaimana kegiatan pemberian dana pada Pilkades di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sidoarjo dan Bagaimana Resolusi untuk mengatasi fenomena maraknya politik uang pada Pilkades desa Masangan Wetan Sidoarjo.

METODE

Dalam judul penelitian ini, penelitian yang bersifat Deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian yang menjelaskan dan memberikan gambaran variable yang diteliti. Kirk dan miller dalam (Gumilang, 2016) yakni mengenai “refitalisasi pendidikan politik di Desa saat Pemilihan Kepala Desa. Lokasi penelitian di Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Sidoarjo yang sudah dilaksanakan penelitian pada bulan Juni sampai Desember 2020. Informan penelitian yang akan diwawancarai beberapa Kandidat Calon Kepala desa, Para Kader tiap-tiap Calon Kepala Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh karangtaruna, Ibu-ibu PKK, Ketua BPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo dan Tokoh partai politik yang ada di Desa, serta unsur-unsur lain yang berkaitan dengan Kompetisis Kepala Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Sidoarjo pada Tahun 2020.

Sumber data Informan yang tahu keadaan yang sebenarnya sesuai tujuan penelitian, observasi dan tatap muka dan wawancara yang sangat mendalam peneliti berhadapan langsung para informan yang dituju di lokasi. Sedangkan data sekunder yang didapat mmenelusuri dari Video, foto-foto dan jurnal-jurnal. Reduksi data pada penelitian ini mengikuti langkah-langkah Miles dan Huberman dalam (Gunawan, 2016) Kegiatan meringkas, 2)memilah perihal yanh penting, 3) meprioritaskan hal-hal yang pokok 4) menelusuri tema dan polanya. Moleong Patton dalam Gunawan (Gunawan, 2016) data yang selesai direduksi akan memberikan paparan lebih gambling dan lebih gampang untuk kegiatan untuk kumpulan data. Rerduksi data Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Reduksi data Miles dan Huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Politik adalah suatu aktifitas yang mempunyai tujuan terbentuknya dan berkembangnya orientasi-orientasi politik dalam diri seseorang. (Sarnoto, 2012) dengan berkembangnya peradaban masyarakat dan berkembangnya teknologi, pendidikan politik sendiri tidak dapat diwariskan yang bisa hanya melalui pengajaran atau pendidikan politik. Sebagai anggota warga yang bertanggungjawab dalam bermsyarakat, berbangsa dan bernegara.

Warga masyarakat selama ini memahami politik memilih para pemimpin baik yang duduk di Legislatif, eksekutif dan Yudikatif dengan harapan para pemimpin dalam membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan betul betul untuk kepentingan warga masyarakat.

Sependapat dengan Susetyo bahwa Pendidikan berubungan erta dengan kegiatan memasukan pengetahuan, ada, kepercayaan, terampil serta aspek-aspek lainnya pada generasi baru pada warga masyarakat melalui interaksi sosial. (Susetyo, 2005). Maka pendidikan politik secara terus menerus dilakukan tanpa putus agar warga masyarakat dapat mempunyai pemahaman politik yang baik dan sanggup berpartisipasi dan dapat mengawal jalannya pemerintahan desa, yang dicerminkan dan ber etika dan berperilaku dalam politiknya.

Menurut Pahlevi, Pendidikan politik adalah suatu perbuatan dengan tujuan untuk mencetak nilai-nilai moral serta orientasi politik pada seseorang.(Pahlevi & Amrurrobi, 2020) Perilaku politik uang akan menghasilkan suatu fenomena patronase dan klientelisme yang merupakan hubungan dua orang yang tidak seimbang, patronase menggunakan sumber daya dan harta keyaanya untuk melindungi, memberikn sejumlah uang, pekerjaan, akan diabalas klientelisme dengan patuh dan setya untuk menuruti peritan sang patron, untuk membantu pekerjaan rumah dan untuk memperoleh jabatan sang patron, klien mendukung dan memilihnya

Money politic atau yang dikenal dengan sebutan politik uang, merupakan studi yang menarik untuk dielaborasi lebih jauh keberadaanya dalam setiap agenda Pemilhan Kepala Desa Masangan Wetan Sidoarjo yang melukai nilai demokrasi. Sebagai arena kontestasi untuk memperoleh kekuasaan, Pemilihan Kepala Desa tidak lagi di lihat sebatas persaingan politik melalui gagasan, program dan visi-misi yang ditawarkan oleh para kontestan wakil rakyat. Akan tetapi Pemilihan Kepala Desa dilihat pula sebagai arena persaingan ekonomi antar calon kepala daerah dengan cara mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk

dibagi-bagikan dengan berbagai bentuk dan cara, sebagai upaya untuk memobilisasi massa dan menjangkau suara pemilih.

Praktik politik uang pada Pemilihan Kepala desa dilaluan oleh Tim Sukses atau kandidat Calon, atau pemilih selain Tim Sukses. Cara yang dilakukan Tim Sukses dalam praktik politik uang yaitu melalui kegiatan kampanye, real dalam politik uang sebagai sarana interaksi pada di luar Tim Sukses dan tim sukses berupa uang tunai, barang dan pemberian janji-janji politik contoh pembangunan untuk kepentingan umum dan Ziarah wali lima (Amanu, 2009)

Dusun anti money politik suatu solusi yang sangat menarik yang disadari pada warga sendiri dan juga kandidat para calon Kepala Desa. Hal tersebut melihat fakta yang ada dimana hukum mengenai money politik yang telah diatur perundang-undangan dan berbagai kebijakan belum berjalan sebagai yang diharapkan oleh warga masyarakat. Betitu juga Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai tugas sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan Pemilihan Kepala desa khususnya untuk mengawasi penyebaran money politik belum berjalan secara maksimal sesuai dengan fungsinya.

Wacana praktik pedukuhan anti money politik, pada pedukuhan Wagir Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Adanya beberapa pedukuhan yang dikabarkan sebagai pedukuhan anti money politik, banyak memberi motivasi bagi pedukuhan lain untuk mengikuti pedukuhan yang telah lama mengabarkan pedukuhan anti money politik, dan pada akhirnya membentuk gerakan pedukuhan anti money politik di desa Masangan Wetan

. Dengan dibentuknya gerakan dusun anti money politik ini secara kasad mata telah menghilangkan kebiasaan yang kurang baik dan menyederai demokrasi, yang selama kurun waktu ini menjadi penghalang dalam penyadaran warga masyarakat arti pentingnya kesadaran politik di masyarakat.

Dengan berjalannya ikrar Dusun anti money politik ini, yang sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun menjelang pelaksanaan Pemilihan kepala desa, secara berangsur-angsur berkurang sangat menurun dan bahkan dinyatakan bersih oleh Badan Permusyawaratan desa pada desa Masangan Wetan kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Melalui perwakilan ketua RT, RW perangkat Desa dan para Kepala dusun dihadapan Badan Permusyawaratan Desa, sebelum hari H pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, beberapa perwakilan berjanji untuk tidak menerima uang sogokan dari para kandidat calon Pemimpin desa.

Ikrar Dusun anti money politik ini, suatu upaya sangat manjur untuk memonitor agar warga pemilih dusun Wagir di desa Masangan wetan serta para kandidat calon Pemimpin desa tidak melakukan kegiatan money politik. Menurut keterangan dari warga masyarakat dan Badan Permusyawaratan desa Masangan Wetan sendiri, money politik yang biasanya dilakukan menjelang hari H pemilihan, menjadi betul betul turun secara cepat dan benar benar lenyap dari praktek money politik, meskipun pendidikan dan mata pencaharian warga masyarakat yang sangat beragam. Sependapat dengan Susanto, Elite lokal disini memiliki peran yang sangat penting dalam pemilihan kepala desa yang diselenggarakan di Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja. (Susanto, 2020)

Sosialisasi yang cukup sering dan pembuatan aturan khusus dapat menyadarkan warga masyarakat menyadari akan pentingnya kejuruan dalam berpolitik dan bagi warga masyarakat yang pengetahuan

politiknya kurang, tidak mau menerima pemberian uang dari para calon karena takut menghindari hukuman yang akan diterapkan oleh pihak berwajib dari hasil monitor dari fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. Meskipun kesadaran politik dirasa kurang, setidaknya warga masyarakat telah melakukan hal yang dibenarkan oleh aturan, dengan tidak menerima money politik dalam bentuk apapun.

Terbentuknya ikrar Dusun anti money politik merupakan bentuk Pendidikan Politik Baru yang hasilnya sangat bagus dalam meningkatkan konsolidasi demokrasi di desa Masangan wetan Kecamatan Sukodono. Hal tersebut dapat dirasakan pada Dusun-dusun yang sudah menerapkan anti money politik, pemberianserangan fajar yang sering dijumpai pada Pemilihan Kepala desa menurun tajam, dan bahkan hilang. Para pemimpin desa yang Jujur, amanah dan dapat dipercaya terlahir dari pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berlangsung jujur.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala desa Masangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sangat jauh dari terwujudnya demokrasi yang sangat bagus, ini terbukti masih ramainya pencederaan demokrasi dan masih terdapat money politik setiap diadakan pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Masangan wetan Kabupaten Sidoarjo. Para calon melalui Tim suksesnya kucing-kucingan untuk membeli suara pada warga masyarakat untuk ditukar dengan suara untuk memilihnya, pada warga masyarakat sendiri mempunyai pendapat ini kesempatan baik, kapan lagi dapat uang dari para calon kalau ada moment pemilihan kepala desa seperti ini, dan ini berlangsung 6 tahun sekali, selama ini hasil panen tanah Bengkok yang memeanen kepala desa, kalau ada pemilihan kepala desa ini warga masyarakat dapat sebagian dari hasil panen tanah ganjaran kepala desa. Money politik pada suatu fenomena yang sudah mendarah daging pada warga masyarakat, desa yang tinggi money politiknya ialah desa Masangan Wetan kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Pada pemilihan Kepala Desa serentak se kabupaten Sidoarjo telah berlangsung pada tanggal 20 Desember 2020, telah terjadi pembelajaran money politik di setiap Dusun di desa Masangan wetan Kabupaten Sidoarjo, dan telah terjadi kedian politik uang saat akan dimulainya pemilihan Kepala desa, dan sangat disayangkan bahwa semua bentuk penyimpangan dan belum tersentuh oleh hukum semua serba dimaklumi Pendidikan politik yang sedang berlangsung dan melalui pembelajaran PPKn di sekolah sosialisasi tentang penggunaan hak pilih oleh warga masyarakat untuk digunakan sebaik-baiknya dengan memilih pemimpin desa sesuai dengan hati nurani belumlah cukup yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan kepala desa melalui perwakilan RT/RW se desa Masangan Wetan belumlah cukup, ternyata masih terjadi transaksi jual beli suara dengan bahasa di masyarakat wani piro. Kabar baik untuk solusi yang lain pendidikan politik yang sangat bagus yang mengurai berbagai masalah money politik, dengan terbentuknya gerakan Dusun-dusun anti korupsi, di desa Masangan wetan kabupaten Sidoarjo, yang bekerja mampu merubah pandangan masyarakat desa Masangan wetan yang pada awalya seperti tumbu dapat tutup dengan maraknya money politik menjelang pemilihan kepala desa dengan sebutan serangan fajar, dengan dibentuknya gerakan dusun-dusun anti money politik kebiasaan warga masyarakat berubah total, money politik menurun pesat dan bahkan betul-betul hilang pada waktu diadakan pemilihan Kepala Desa Masangan wetan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, M. N. (2011). Memahami perkembangan desa di Indonesia. *ACADEMICA Fisip Untad*, 03(02), 647–660.
- Almon, G. (1984). *The civic culture : budaya politik tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara*. Bina Aksara.
- Amanu, M. (2009). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri) Mohamad Amanu 105120101111019. *Cendekia*.
- Ashaf, A. F. (2006). Pola Relasi Media, Negara, Dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens Sebagai Alternatif. *Sosiohumaniora*, 8(2), 205–218. <https://doi.org/10.24198/SOSIOHUMANIORA.V8I2.5371>
- Cholisin. (2018). KONSOLIDASI DEMOKRASI MELALUI PENGEMBANGAN KARAKTER KEWARGANEGARAAN. *Cendekia*.
- Dwiputrianti, S. (2009). MEMAHAMI STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI Understanding the Strategy for Eradicating Corruption in the Case of Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(3), 256–281. <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364>
- Fahmy, B. I. Z., & Abdullah, D. (2010). *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Indonesian Corroption Woth.
- Garnida, D., Mangkuprawira, S., Pasaribu, B., & Hermawan, A. (2011). Peran Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional. In *Jurnal Manajemen & Agribisnis* (Vol. 8, Nomor 1, hal. 10–19). <https://doi.org/10.17358/jma.8.1.10-19>
- Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2). <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>
- Gunawan, I. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. *Pendidikan*, 27.
- Halili. (2009). Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura. *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)*, 14 Nomor 2(5), 255. ???
- Hartanti, E. (2006). *Tindak Pidana korupsi*. Pustaka Pelajar.
- Kantaprawira, R. (2015). Penguatan Lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Cendekia*, 634.
- Kreano, J. (2014). Keefektifan Strategi Pembelajaran React Pada Kemampuan Siswa Kelas VII Aspek Komunikasi Matematis. *Keefektifan Strategi Pembelajaran React Pada Kemampuan Siswa Kelas VII Aspek Komunikasi Matematis*, 5(1), 91–98. <https://doi.org/10.15294/kreano.v5i1.3282>
- Kurniasih, D. (2020). Pendidikan Politik Pemilih Muda Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bandung 2019. *Indonesian Community Service and Empowerment (IComSE)*, 1(1), 16–21. <https://doi.org/10.34010/icomse.v1i1.2791>
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Pahlevi, M. E. T. P., & Amrullohi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula. *Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 10(1), 44–51.
- Sanusi, A. R., & Darmawan, C. (2016). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEMBENTUK KARAKTER KEPEMIMPINAN LINTAS BUDAYA PADA GENERASI MUDA DEMI MEWUJUDKAN BUDAYA POLITIK PANCASILA (Studi Deskriptif terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 24. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i1.3668>
- Sarnoto, A. Z. (2012). *Konsepsi politik pendidikan di Indonesia*. 01(1), 30–40.
- Sukmajati, E. A. dan M. (2013). Patronase dan Klientisme dalam Politik Elektoral di Indonesia. *polgov UGM*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Suryanti, dkk. (2008). *Model-model Pembelajaran inovatif*. Unesa Press.

Susanto, R. (2020). Peran Tokoh Agama kuasa elit politik dalam Pilkades 2017 di desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan ilir. *Ampera: A Research journal on Politic and Islamic Civilization*, 1 No. 3 Ag, 238–253.

Susetyo, B. (2005). *Politik Pendidikan Penguasa*. LKIS.

Umar, M. (2015). Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 102–135. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/170>